

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2019**

Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2019

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Padang, 08 Januari 2019
Kepala Balai,

Ir. Eka Darnida Yanto, M.Si
NIP. NIP. 196503271991031001

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

B.5.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Aset Lainnya

C.3.1. Aset Lain-lain

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

C.5. Ekuitas

C.5.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

D.6. Beban Perjalanan Dinas

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

- D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
- D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Ekuitas Awal
 - E.2. Surplus/Defisit-LO
 - E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
 - E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Padang, 08 Januari 2019
Kepala Balai,

Ir. Eka Darnida Yanto, M.Si
NIP. NIP. 196503271991031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.480.702.354,00 atau mencapai 111,25% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.330.925.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp9.472.131.518,00 atau mencapai 99,94% dari alokasi anggaran sebesar Rp9.477.913.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp27.737.067.107,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp310.429.195,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp27.426.637.912,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp73.592.550,00 dan Rp27.663.474.557,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.430.601.722,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp8.707.499.686,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-7.276.897.964,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp38.435.239,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-7.238.462.725,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp26.894.052.159,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-7.238.462.725,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp349.459,00 dan ditambah

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp8.007.535.664,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp27.663.474.557,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PADANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019			31 Desember 2018
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	1.330.925.000,00	1.480.702.354,00	111,25	1.317.386.709,00
Jumlah Pendapatan		1.330.925.000,00	1.480.702.354,00	111,25	1.317.386.709,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	3.933.712.000,00	3.933.325.147,00	99,99	3.853.303.881,00
Belanja Barang	B.4.	3.635.441.000,00	3.630.429.098,00	99,86	2.855.558.346,00
Belanja Modal	B.5.	1.908.760.000,00	1.908.377.273,00	99,98	1.521.302.000,00
Jumlah Belanja		9.477.913.000,00	9.472.131.518,00	99,94	8.230.164.227,00

II. NERACA

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PADANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1.	310.429.195,00	227.737.170,00
Jumlah Aset Lancar		310.429.195,00	227.737.170,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	11.437.873.000,00	11.437.873.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	9.246.462.912,00	8.226.091.639,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	13.818.281.468,00	13.178.560.100,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	1.528.625.300,00	1.498.825.300,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	1.606.000,00	1.606.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-8.606.210.768,00	-7.646.585.891,00
Jumlah Aset Tetap		27.426.637.912,00	26.696.370.148,00
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.3.1.	0,00	1.114.191.200,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2.	0,00	-1.105.471.488,00
Jumlah Aset Lainnya		0,00	8.719.712,00
Jumlah Aset		27.737.067.107,00	26.932.827.030,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	73.592.550,00	38.774.871,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		73.592.550,00	38.774.871,00
Jumlah Kewajiban		73.592.550,00	38.774.871,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	27.663.474.557,00	26.894.052.159,00
Jumlah Ekuitas		27.663.474.557,00	26.894.052.159,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		27.737.067.107,00	26.932.827.030,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PADANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	1.430.601.722,00	1.258.876.090,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.430.601.722,00	1.258.876.090,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	3.930.542.215,00	3.863.090.393,00
Beban Persediaan	D.3.	206.217.426,00	261.273.525,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	1.705.635.110,00	1.488.585.616,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	631.744.954,00	441.840.000,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	1.059.749.645,00	684.680.285,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	1.173.610.336,00	986.923.310,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8.	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		8.707.499.686,00	7.726.393.129,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-7.276.897.964,00	-6.467.517.039,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	45.252.000,00	56.354.000,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	8.719.712,00	0,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	9.145.900,00	341.487,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	7.242.949,00	15.141.029,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		38.435.239,00	41.554.458,00
SURPLUS/DEFISIT – LO		-7.238.462.725,00	-6.425.962.581,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I PADANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 dan 31 DESEMBER 2018**

Uraian	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
EKUITAS AWAL	E.1.	26.894.052.159,00	26.390.366.722,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-7.238.462.725,00	-6.425.962.581,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	349.459,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.1.	349.459,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	8.007.535.664,00	6.929.648.018,00
EKUITAS AKHIR	E.5.	27.663.474.557,00	26.894.052.159,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang

Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai visi “Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani” serta menjadi benteng terdepan pertanian untuk mencegah masuk dan keluarnya hama penyakit hewan maupun tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai

Karantina Pertanian Kelas I Padang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang

menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	925.000,00	925.000,00
Pendapatan Jasa Karantina dan Peternakan	1.330.000.000,00	1.330.000.000,00
Jumlah Pendapatan	1.330.925.000,00	1.330.925.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.091.980.000,00	3.162.479.000,00
Belanja Lembur	841.732.000,00	771.233.000,00
Belanja Barang Operasional	914.819.000,00	920.819.000,00
Belanja Barang Non Operasional	133.789.000,00	202.389.000,00
Belanja Barang Persediaan	304.120.000,00	270.920.000,00
Belanja Jasa	574.718.000,00	545.400.000,00
Belanja Pemeliharaan	627.445.000,00	631.763.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	915.550.000,00	1.064.150.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.232.600.000,00	1.235.590.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	646.160.000,00	643.370.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	30.000.000,00	29.800.000,00
Jumlah Belanja	9.312.913.000,00	9.477.913.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.480.702.354,00 atau mencapai 111,25% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.330.925.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	925.000,00	46.177.200,00	4.992,13
Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	127.920.000,00	0,00
Pendapatan Jasa Karantina dan Peternakan	1.330.000.000,00	1.301.756.521,00	97,88
Pendapatan Lain-lain	0,00	4.848.633,00	0,00
Jumlah	1.330.925.000,00	1.480.702.354,00	111,25

Realisasi Pendapatan TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 12,40% dibandingkan TA 2018. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	46.177.200,00	57.271.350,00	-19,37
Pendapatan Jasa Lainnya	127.920.000,00	103.470.000,00	23,63
Pendapatan Jasa Karantina dan Peternakan	1.301.756.521,00	1.156.645.200,00	12,55
Pendapatan Lain-lain	4.848.633,00	159,00	3.049.354,72
Jumlah	1.480.702.354,00	1.317.386.709,00	12,40

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2019 adalah sebesar Rp9.472.131.518,00 atau 99,94% dari anggaran belanja sebesar Rp9.477.913.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2019

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Belanja Pegawai	3.933.712.000,00	3.933.698.194,00	100,00
Belanja Barang	3.635.441.000,00	3.630.429.098,00	99,86

Uraian	2019		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Modal	1.908.760.000,00	1.908.377.273,00	99,98
Total Belanja Kotor	9.477.913.000,00	9.472.504.565,00	99,94
Pengembalian Belanja		-373.047,00	0.00
Total Belanja	9.477.913.000,00	9.472.131.518,00	99,94

Dibandingkan dengan Tahun 2018, Realisasi Belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 15,09% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Dikarenakan kenaikan gaji pokok Pegawai PNS, kegiatan operasional dan belanja modal pendukung kegiatan perkarantinaan

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	.%
Belanja Pegawai	3.933.325.147,00	3.853.303.881,00	2,08
Belanja Barang	3.630.429.098,00	2.855.558.346,00	27,14
Belanja Modal	1.908.377.273,00	1.521.302.000,00	25,44
Total Belanja	9.472.131.518,00	8.230.164.227,00	15,09

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.933.325.147,00 dan Rp3.853.303.881,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 2,08% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Dikarenakan kenaikan gaji pokok pegawai PNS

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.162.473.194,00	3.127.879.925,00	1,11

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Lembur	771.225.000,00	725.424.000,00	6,31
Jumlah Belanja Kotor	3.933.698.194,00	3.853.303.925,00	2,09
Pengembalian Belanja Pegawai	-373.047,00	-44,00	847.734,09
Jumlah Belanja	3.933.325.147,00	3.853.303.881,00	2,08

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.630.429.098,00 dan Rp2.855.558.346,00. Realisasi belanja barang TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 27,14% dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Dikarenakan kenaikan kegiatan operasional, non operasional, persediaan langganan daya/jasa, pemeliharaan dan perjalanan dalam negeri.

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	920.818.993,00	842.053.302,00	9,35
Belanja Barang Non Operasional	202.389.000,00	160.625.000,00	26,00
Belanja Barang Persediaan	270.900.000,00	265.792.000,00	1,92
Belanja Jasa	544.826.506,00	460.567.759,00	18,29
Belanja Pemeliharaan	631.744.954,00	441.840.000,00	42,98
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.059.749.645,00	684.680.285,00	54,78
Jumlah Belanja Kotor	3.630.429.098,00	2.855.558.346,00	27,14
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	3.630.429.098,00	2.855.558.346,00	27,14

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.908.377.273,00 dan Rp1.521.302.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 25,44% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Realisasi belanja modal berupa kendaraan roda 4, gedung arsip, rehab rumah dinas untuk melengkapi sarana dan prasarana.

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.235.207.273,00	813.454.000,00	51,85
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	643.370.000,00	420.288.000,00	53,08
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	29.800.000,00	287.560.000,00	-89,64
Jumlah Belanja Kotor	1.908.377.273,00	1.521.302.000,00	25,44
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1.908.377.273,00	1.521.302.000,00	25,44

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.235.207.273,00 dan Rp813.454.000,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 51,85% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Kenaikan dikarenakan kebutuhan peralatan yang menunjang kegiatan operasional perkarantinaan

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.235.207.273,00	813.454.000,00	51,85
Jumlah Belanja Kotor	1.235.207.273,00	813.454.000,00	51,85
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1.235.207.273,00	813.454.000,00	51,85

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp643.370.000,00 dan Rp420.288.000,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 53,08% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Kenaikan disebabkan pembangunan gedung arsip dan rehab rumah dinas

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	643.370.000,00	420.288.000,00	53,08
Jumlah Belanja Kotor	643.370.000,00	420.288.000,00	53,08
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	643.370.000,00	420.288.000,00	53,08

B.5.3. BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp29.800.000,00 dan Rp287.560.000,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019 mengalami penurunan sebesar -89,64% dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Berkurangnya alokasi dan kebutuhan satker untuk belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	29.800.000,00	287.560.000,00	-89,64
Jumlah Belanja Kotor	29.800.000,00	287.560.000,00	-89,64
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	29.800.000,00	287.560.000,00	-89,64

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp310.429.195,00 dan Rp227.737.170,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Barang Konsumsi	310.429.195,00	227.737.170,00
Jumlah	310.429.195,00	227.737.170,00

Saldo TA 2018 audited	227.737.170
Mutasi Tambah :	287.224.250
- Pembelian	270.900.000
- Transfer Masuk	16.324.250
Mutasi Kurang :	204.532.225
- Pemakaian	206.217.426
- Transfer Keluar	217.750
- Barang Usang	6.709.999
- Koreksi Penyesuaian Persediaan	-8.612.950
Saldo Per 31 Desember 2019	310.429.195

Saldo TA 2018 audited sama dengan nilai audited yang sudah diperiksa KPKNL dan KPPN.

Penambahan

- Pembelian menggunakan MAK 521811 (Belanja barang konsumsi) untuk peningkatan pelayanan operasional karantina.
- Transfer masuk berupa penerimaan dokumen utama karantina dari sekretariat Badan Karantina Pertanian.

Pengurangan

- Pemakaian berupa pemakaian ATK, bahan lab dan dokumen utama untuk pelayanan operasional karantina.

- Transfer Keluar berupa pengiriman dokumen utama karantina ke Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan.
- Barang Usang berupa dokumen utama dan penunjang yang sudah tidak terpakai.
- Koreksi Penyesuaian dari selisih dari nilai pembelian.

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp11.437.873.000,00 dan Rp11.437.873.000,00.

No	Luas	Lokasi	Nilai
1.	324,00m2	Sutan Syahrir Rt.01/01, Padang Selatan	807,975,000.00
2.	1.070,00m2	Jl. Banda Cina Rt.--, Batang Anai	356,043,000.00
3.	935,00m2	Olo Bangau Rt.-, Batang Anai	1,146,684,000.00
4.	1.385,00m2	Sutan Syahrir Rt.-, Padang Selatan	3,588,881,000.00
5.	19.000,00m2	Jl. Pasir Jambak Rt.03/VII, Koto Tengah	5,277,250,000.00
6.	1.004,00m2	Olo Bangau Rt.-, Batang Anai	261,040,000.00
Jumlah			11,437,873,000.00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp9.246.462.912,00 dan Rp8.226.091.639,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	8.226.091.639,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	1.235.207.273,00
Mutasi Kurang	

Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-213.636.000,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-1.200.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	9.246.462.912,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-7.274.878.063,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	1.971.584.849,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Mutasi penambahan dari pembelian :

- Pengadaan Sepeda Motor	5 UNIT	92.494.200
- Alat angkut Roda 3	1 UNIT	35.669.153
- Personal Computer	3 Unit	29.102.400
- Laptop	3 Unit	29.990.000
- Printer Inkjet All In One	3 Unit	15.632.640
- Printer Laser Jet	3 Unit	7.830.000
- Printer Ink Jet	3 Unit	13.456.500
- Infocus	1 Unit	9.481.500
- Fingerprint	2 Unit	23.000.000
- Kursi Kerja /Rapat	13 UNIT	45.500.000
- Kursi Penghadap Pimpinan	2 UNIT	5.600.000
- Mejas Keja Biro (Pimpinan)	1 UNIT	8.850.000
- Kursi Kerja Pimpinan	1 UNIT	4.000.000
- Mejas Rapat	1 UNIT	39.800.000
- Filling Kabinet	3 UNIT	10.050.000
- Lemari / Rak Arsip	3 UNIT	44.700.000
- AC Split 2 PK	1 UNIT	8.800.000
- AC Split 1,5 PK	7 UNIT	52.500.000
- Tabung Pemadam Api	4 UNIT	11.600.000
- Pengadaan Sound System	1 SET	74.750.000
- Pengadaan Wireless	1 UNIT	4.275.000
- CCTV (8 Channel)	1 SET	44.800.000
- Televisi	2 UNIT	15.000.000
- Stomacher	1 UNIT	87.500.000
- Kendaraan Roda 4	1 UNIT	246.000.000
- Uninterrupted Power Supply	1 UNIT	2.610.240
- Sice	3 SET	16.500.000
- Meja Rapat	1 UNIT	1.955.000
- Kendaraan Roda 4	1 UNIT	246.000.000
- Unit Power Supply	1 UNIT	2.610.240
- Printer Ink Jet All In One	1 UNIT	5.150.400
Jumlah		1.235.207.273

2. Mutasi kurang yaitu

- a. Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp-213.636.000,00 dikarenakan rusak berat dan sudah dilakukan

penghapusan dengan proses lelang dengan nomor: 278/08/2019 tanggal 06 Mei 2019 Terdiri dari:

Sepeda Motor	3 Unit	44.136.000
Mobil Unit Kesehatan Hewan	1 Unit	169.500.000

- b. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas karena TGR tanggal 02 April 2019 berupa meja reseptionis sebesar Rp-1.200.000,00.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp13.818.281.468,00 dan Rp13.178.560.100,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	13.178.560.100,00
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	183.270.000,00
Penyelesaian Pembangunan Langsung	84.700.000,00
Pengembangan Nilai Aset	81.200.000,00
Pengembangan Melalui KDP	294.200.000,00
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-3.648.632,00
Saldo per 31 Desember 2019	13.818.281.468,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-1.025.885.121,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	12.792.396.347,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

1. Mutasi penambahan :

- Pembangunan Gedung Arsip		
- Pekerjaan Fisik	32 M2	159.500.000
- Konsultasi Perencana	1 KEG	9.500.000
- Konsultasi Pengawas	1 KEG	6.270.000
- Pengelola Teknis	1 KEG	2.700.000
- Pengelola Teknis	4 KEG	5.300.000
- Pembuatan Pilon Icon di Kantor Wilker BIM	1 UNIT	84.700.000
- Pemasangan Pavingblock halaman kantor BIM	220 M2	81.200.000
Rehab Instalsi KP di IKH Pasir Jambak		
- Pekerjaan Fisik	60 M2	140.000.000
- Konsultasi Perencanaan	1 KEG	8.400.000
- Pengembangan dan Renovasi Rumah Negara		
- Pekerjaan Fisik	36 M2	125.600.000
- Konsultasi Perencana	1 KEG	8.700.000
- Konsultasi Pengawas	1 KEG	5.200.000
- Pengelola Teknis	1 KEG	1.800.000
- Pengelola Teknis	4 KEG	4.500.000
Jumlah		643.370.000

2. Mutasi pengurangan koreksi pencatatan nilai/kuantitas dikarenakan TGR tanggal 02 April 2019 berupa bangunan gedung kantor permanen sebesar Rp-3.648.632,00

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.528.625.300,00 dan Rp1.498.825.300,00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	1.498.825.300,00
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Langsung	29.800.000,00
Saldo per 31 Desember 2019	1.528.625.300,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	-273.789.274,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	1.254.836.026,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah berupa:

1. Mutasi penambahan :

- Penyambungan Listrik Gedung HPR	1 KEG	5.000.000
-Penambahan Jaringan Air bersih kantor induk	1 SET	24.800.000
Jumlah		29.800.000

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.606.000,00 dan Rp1.606.000,00.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp-8.606.210.768,00 dan Rp-7.646.585.891,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	9.246.462.912,00	-7.274.878.063,00	1.971.584.849,00
2.	Gedung dan Bangunan	13.818.281.468,00	-1.025.885.121,00	12.792.396.347,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.528.625.300,00	-273.789.274,00	1.254.836.026,00
4.	Aset Tetap Lainnya	1.606.000,00	0,00	1.606.000,00
Akumulasi Penyusutan		24.594.975.680,00	-8.606.210.768,00	15.988.764.912,00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.114.191.200,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	1.114.191.200,00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	213.636.000,00
Mutasi Kurang	
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	-1.327.827.200,00
Saldo per 31 Desember 2019	0,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2019	0,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain adalah berupa:

1. Mutasi penambahan Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp213.636.000,00 dikarenakan rusak berat dan sudah dilakukan penghapusan dengan proses lelang dengan nomor: 278/08/2019 tanggal 06 Mei 2019 Terdiri dari:

Sepeda Motor	3 Unit	44.136.000
Mobil Unit Kesehatan Hewan	1 Unit	169.500.000

2. Mutasi pengurangan dikarenakan rusak berat dan sudah dilakukan penghapusan dengan proses lelang dengan nomor: 054/08/2019 tanggal 07 Pebruari 2019 dan nomor 278/08/2019 tanggal 06 Mei 2019.

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-1.105.471.488,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
	Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	0,00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp73.592.550,00 dan Rp38.774.871,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	8.337.068,00	11.120.000,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	65.255.482,00	27.654.871,00
Jumlah	73.592.550,00	38.774.871,00

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp27.663.474.557,00 dan Rp26.894.052.159,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.430.601.722,00 dan Rp1.258.876.090,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Pendapatan Anggaran Lain-lain	1,00	0,00	0,00
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	1.301.756.521,00	1.154.488.740,00	12,76
Pendapatan Jasa Lainnya	127.920.000,00	103.470.000,00	23,63
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	925.200,00	917.350,00	0,86
Jumlah	1.430.601.722,00	1.258.876.090,00	13,64

Kenaikan dikarenakan meningkatnya lalu lintas komoditi pertanian, terdapat pendapatan anggaran lain-lain dikarenakan kelebihan setor sisa uang persediaan dan tidak dibukukan di bendahara pengeluaran.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp3.930.542.215,00 dan Rp3.863.090.393,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	2.140.338.300,00	2.092.339.700,00	2,29
Beban Pembulatan Gaji PNS	32.611,00	32.815,00	-0,62
Beban Tunj. Anak PNS	45.702.252,00	45.517.922,00	0,41

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Tunj. Beras PNS	114.640.860,00	120.579.300,00	-4,92
Beban Tunj. Fungsional PNS	253.060.000,00	252.290.000,00	0,31
Beban Tunj. PPh PNS	5.590.412,00	2.355.856,00	137,30
Beban Tunj. Struktural PNS	47.880.000,00	47.340.000,00	1,14
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	149.629.780,00	149.282.800,00	0,23
Beban Tunjangan Umum PNS	31.880.000,00	35.135.000,00	-9,26
Beban Uang Lembur	771.225.000,00	725.424.000,00	6,31
Beban Uang Makan PNS	370.563.000,00	392.793.000,00	-5,66
Jumlah	3.930.542.215,00	3.863.090.393,00	1,75

Realisasi belanja pegawai terjadi kenaikan pada Semester II tahun anggaran 2019 sebesar 1,75% dikarenakan kenaikan realisasi dari gaji pokok, tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan PPh, uang lembur.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp206.217.426,00 dan Rp261.273.525,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	206.217.426,00	261.273.525,00	-21,07
Jumlah	206.217.426,00	261.273.525,00	-21,07

Penurunan sebesar -21,07% dikarenakan pemakaian bahan persediaan.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.705.635.110,00 dan Rp1.488.585.616,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0,00	13.500.000,00	-100,00
Beban Bahan	202.389.000,00	160.625.000,00	26,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	166.440.000,00	160.940.000,00	3,42
Beban Jasa Lainnya	54.000.000,00	11.000.000,00	390,91
Beban Jasa Profesi	7.400.000,00	36.000.000,00	-79,44
Beban Keperluan Perkantoran	591.154.993,00	520.732.912,00	13,52
Beban Langganan Air	19.304.600,00	10.857.800,00	77,79
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	216.310.300,00	162.628.324,00	33,01
Beban Langganan Listrik	252.148.440,00	216.634.682,00	16,39
Beban Langganan Telepon	3.263.777,00	5.286.508,00	-38,26
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	154.224.000,00	154.224.000,00	0,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9.000.000,00	6.156.390,00	46,19
Beban Sewa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Jumlah	1.705.635.110,00	1.488.585.616,00	14,58

Kenaikan sebesar 11,94% dikarenakan peningkatan pada keperluan perkantoran, pengiriman surat pos, honor operasional satuan kerja, beban bahan, tagihan langganan air, langganan daya dan jasa lainnya jasa lainnya.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp631.744.954,00 dan Rp441.840.000,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	151.747.000,00	66.577.000,00	127,93
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	479.997.954,00	375.263.000,00	27,91
Jumlah	631.744.954,00	441.840.000,00	42,98

Kenaikan sebesar 42,98% peningkatan pemeliharaan gedung dan bangunan dan Peralatan dan mesin.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.059.749.645,00 dan Rp684.680.285,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	469.074.562,00	270.000.690,00	73,73
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	52.590.000,00	28.950.000,00	81,66
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	430.255.083,00	258.999.595,00	66,12
Beban Perjalanan Tetap	107.830.000,00	126.730.000,00	-14,91
Jumlah	1.059.749.645,00	684.680.285,00	54,78

Kenaikan sebesar 54,78% peningkatan realisasi perjalanan biasa, dinas dalam kota dan paket meeting luar kota.

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp1.173.610.336,00 dan Rp986.923.310,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	363.603.742,00	341.122.927,00	6,59
Beban Penyusutan Irigasi	14.949.324,00	14.949.324,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	60.822.292,00	54.363.960,00	11,88
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0,00	1.516.133,00	-100,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	734.234.978,00	574.970.966,00	27,70
Jumlah	1.173.610.336,00	986.923.310,00	18,92

Kenaikan sebesar 18,91% dikarenakan berkurangnya masa manfaat aset tetap tersebut.

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-8.719.712,00	0,00	0,00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-532.950,00	-5.339.954,00	-90,02
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	-6.709.999,00	-9.801.075,00	-31,54
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	9.145.900,00	341.328,00	2.579,50
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	45.252.000,00	56.354.000,00	-19,70
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	159,00	-100,00
Jumlah	38.435.239,00	41.554.458,00	-7,51

Penurunan sebesar -7,51% dikarenakan penurunan pada beban penyesuaian nilai persediaan dan kerugian persediaan rusak/usang.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp26.894.052.159,00 dan Rp26.390.366.722,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp-7.238.462.725,00 dan Rp-6.425.962.581,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp349.459,00 dan Rp0,00.

E.3.1. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp349.459,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	109.459,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	240.000,00
Gedung dan Bangunan	-3.648.632,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	4.848.632,00
Pengembalian Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	4.848.632,00
Peralatan dan Mesin	-1.200.000,00
Jumlah	349.459,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp8.007.535.664,00 dan Rp6.929.648.018,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2019.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2019
Ditagihkan ke Entitas Lain	9.472.131.518,00
Diterima dari Entitas Lain	-1.480.702.354,00
Transfer Keluar	-217.750,00
Transfer Masuk	16.324.250,00
Jumlah	8.007.535.664,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2019 saldo DDEL adalah sebesar Rp-1.480.702.354,00 sedangkan DKEL sebesar Rp9.472.131.518,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp16.324.250,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2019.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Barang Konsumsi	018120199412110000KP	16.324.250,00
Jumlah			16.324.250,00

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp-217.750,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Keluar per 31 Desember 2019.

No	Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
1.	Barang Konsumsi	018120700526462000KD	-217.750,00
Jumlah			-217.750,00

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp27.663.474.557,00 dan Rp26.894.052.159,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada penjelasan mengenai kejadian-kejadian penting setelah tanggal Neraca.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 362/Kpts/KP.230/A/5/2019 Tanggal 13 Mei 2019 Tentang Pemberhentian, pemindahan dan pengangkatan dari dan dalam jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana lingkup Badan Karantina Pertanian. Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Ir. Eka Darnida Yanto, M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen	: Edriati, STP
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Ahmad Yusuf, SH. MM
Bendahara Pengeluaran	: Suwarseh, SE

Sampai dengan 31 Desember 2019 Balai Karantina Pertanian Kelas I Padang telah melakukan Revisi DIPA sebanyak 5 kali dengan rincian sebagai berikut :

1. DIPA Revisi 1 Tanggal 30 Mei 2019
2. DIPA Revisi 2 Tanggal 28 Juni 2019
3. DIPA Revisi 3 Tanggal 17 September 2019
4. DIPA Revisi 4 Tanggal 29 Nopember 2019
5. DIPA Revisi 5 Tanggal 13 Desember 2019